



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 841/Kep.048-BKPSDM/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 116);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Besaran dan rincian pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Besaran dan rincian pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai dasar untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 841/Kep.180-BKPP/2021 tentang Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 841/Kep.180-BKPP/2021 tentang Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

BESARAN DAN RINCIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022

A. TPP ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Besaran TPP
15	31.061.974	100%	31.061.974
14	23.647.023	100%	23.647.023
13	21.223.455	100%	21.223.455
12	16.970.279	100%	16.970.279
11	13.120.147	100%	13.120.147
10	11.412.512	100%	11.412.512
9	9.927.613	100%	9.927.613
8	7.979.213	100%	7.979.213
7	7.035.241	100%	7.035.241
6	6.113.543	100%	6.113.543
5	5.098.508	100%	5.098.508
4	3.021.770	100%	3.021.770
3	2.496.752	100%	2.496.752
2	2.065.071	100%	2.065.071
1	1.633.389	100%	1.633.389

B. TPP ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

I. TPP ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR, PENGAWAS, KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR HASIL
PENYETARAAN JABATAN

Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Besaran TPP
15	31.061.974	50%	15.530.987
14	23.647.023	45%	10.641.160
13	21.223.455	40%	8.489.382
12	16.970.279	40%	6.788.112
11	13.120.147	20%	2.624.029
10	11.412.512	20%	2.282.502
9	9.927.613	20%	1.985.523
8	7.979.213	15%	1.196.882
7	7.035.241	-	-
6	6.113.543	-	-
5	5.098.508	-	-
4	3.021.770	-	-
3	2.496.752	-	-
2	2.065.071	-	-
1	1.633.389	-	-

II. TPP ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI INSPEKTUR PEMBANTU DAN KEPALA
BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD

Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Besaran TPP
11	13.120.147	35%	4.592.051

- C. TPP ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA (Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kesehatan, Urusan Pengelolaan Keuangan, Urusan Perencanaan Daerah, Urusan Trantibumlinmas, Urusan Perhubungan, Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah, Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Tim Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah)

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
15	31.061.974	8%	2.484.958
14	23.647.023	8%	1.891.762
13	21.223.455	8%	1.697.876
12	16.970.279	8%	1.357.622
11	13.120.147	8%	1.049.612
10	11.412.512	8%	913.001
9	9.927.613	8%	794.209
8	7.979.213	8%	638.337
7	7.035.241	8%	562.819
6	6.113.543	8%	489.083
5	5.098.508	8%	407.881
4	3.021.770	8%	241.742
3	2.496.752	8%	199.740
2	2.065.071	8%	165.206
1	1.633.389	8%	130.671

- D. TPP ASN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kelangkaan Profesi	Besaran TPP
15	31.061.974	40%	12.424.790

- E. TPP ASN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

- I. PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

1. SEKRETARIAT DAERAH

Kelas Jabatan	Besaran TPP
15	9.318.592
14	7.094.107
13	3.183.518
12	2.715.245
11	1.968.022
10	1.711.877
9	1.489.142
8	1.196.882
7	1.055.286
6	917.031
5	764.776
4	453.266
3	374.513
2	309.761
1	245.008

2. INSPEKTORAT

Kelas Jabatan	Besaran TPP
14	2.364.702
13	2.122.346
12	1.697.028
11	1.312.015
10	1.141.251
9	992.761
8	797.921
7	703.524
6	611.354
5	509.851
4	302.177
3	249.675
2	206.507
1	163.339

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kelas Jabatan	Besaran TPP
14	14.188.214
13	10.611.728
12	10.182.167
11	6.560.074
10	5.706.256
9	4.963.807
8	3.989.607
7	3.517.621
6	3.056.772
5	2.804.179
4	1.661.974
3	1.248.376
2	1.032.536
1	816.695

4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kelas Jabatan	Besaran TPP
14	2.128.232
13	1.910.111
12	1.527.325
11	1.180.813
10	1.027.126
9	893.485
8	718.129
7	633.172
6	550.219
5	458.866
4	271.959
3	224.708
2	185.856
1	147.005

4. DINAS KESEHATAN

Jabatan	Besaran TPP
Kepala Dinas Kesehatan	4.700.000
Direktur Rumah Sakit/Sekretaris Dinas	4.350.000
Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan /Kepala Bagian pada Rumah Sakit	2.300.000
Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala UPT / Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan dan Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi pada Rumah Sakit	1.200.000
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pada Dinas Kesehatan	700.000

II. PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KHUSUS KEUANGAN

No.	Kelompok / Jenis Jabatan	Besaran TPP
1.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	
	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	14.694.595
	Bendahara Umum Daerah (BUD)	9.243.373
	Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	8.263.902
	Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Pembantu BUD	
	- Eselon III.a	5.507.243
	- Eselon III.b	3.504.442
	- Eselon IV.a/Sub Koordinator	2.959.845
	- Pelaksana	1.888.690

No.	Kelompok / Jenis Jabatan	Besaran TPP
	Pegguna Anggaran / Pegguna Barang :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	1.459.459
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	1.702.703
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.945.946
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	2.189.189
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	2.432.432
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	2.675.676
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	2.918.919
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	3.405.405
	Kuasa Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Barang :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	972.973
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	1.216.216
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	1.459.459
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.702.703
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.945.946
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	2.189.189
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	2.432.432
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	2.675.676
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	3.162.162
	Pejabat Penatausahaan Keuangan :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	681.081
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	827.027
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	972.973
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.118.919
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.264.865
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.410.811
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.556.757
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.702.703
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	2.189.189
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Petugas Penguji Kelengkapan Dokumen dan/atau verifikasi harian atas penerimaan/pengeluaran, Petugas Penyusun Akuntansi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah) :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	437.838
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	583.784
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	729.730
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	875.676
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.021.622
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.167.568
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.313.514
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.459.459
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	1.945.946
	Bendahara Penerimaan / Pengeluaran :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	583.784
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	729.730
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	875.676
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	1.021.622
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.167.568
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.313.514
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.459.459
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.702.703
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	2.043.243

No.	Kelompok / Jenis Jabatan	Besaran TPP
	Bendahara Pengeluaran Pembantu :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	583.784
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	681.081
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	778.378
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	875.676
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	972.973
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.070.270
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.167.568
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.264.865
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	1.654.054
	Bendahara Penerimaan Pembantu :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	583.784
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	681.081
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	778.378
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	875.676
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	972.973
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.070.270
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.167.568
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.264.865
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	1.702.703
	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Penyusun Dokumen/Pembukuan dan Pengurus Gaji) :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	535.135
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	632.432
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	729.730
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	827.027
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	924.324
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.021.622
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.118.919
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.216.216
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	1.654.054
	Pembantu Bendahara Penerimaan (Penyusun Dokumen / Pembukuan, dan Penyetor) :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	535.135
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	632.432
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	729.730
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	827.027
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	924.324
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.021.622
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.118.919
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	1.216.216
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	1.654.054
2.	PEJABAT PENGELOLA BARANG	
	Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang :	
	- Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	632.432
	- Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	729.730
	- Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	827.027
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 1 milyar	924.324
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	1.021.622
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	1.118.919
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	1.216.216
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar	1.313.514

No.	Kelompok / Jenis Jabatan	Besaran TPP
3.	PEJABAT PENGELOLA PELAKSANA KEGIATAN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
	- Nilai Pagu Dana s/d 200 jt	681.081
	- Nilai Pagu di atas 200 jt - 500 jt	972.973
	- Nilai Pagu di atas 500 jt - 999 jt	1.118.919
	- Lebih dari 1 milyar	1.313.514
4.	PEJABAT PENGADAAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SETDA DENGAN ANGGARAN BERBASIS APBD	
	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola Barang dan Jasa	
	- Nilai Pagu sampai dengan 1 milyar	2.790.000
	- Nilai Pagu di atas 1 milyar - 2,5 milyar	3.130.000
	- Nilai Pagu di atas 2,5 milyar - 5 milyar	3.580.000
	- Nilai Pagu di atas 5 milyar - 10 milyar	4.030.000
	- Nilai Pagu di atas 10 milyar - 50 milyar	4.490.000
	- Nilai Pagu di atas 50 milyar	4.940.000
5.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI PERANGKAT DAERAH DENGAN BERBASIS APBD	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
	Nilai Pagu Dana s/d 100 jt	707.000
	Nilai Pagu di atas 100 jt 250 jt	847.000
	Nilai Pagu di atas 250 jt 500 jt	987.000
	Nilai Pagu di atas 500 jt 1 milyar	1.127.000
	Nilai Pagu di atas 1 milyar 2,5 milyar	1.337.000
	Nilai Pagu di atas 2,5 milyar 5 milyar	1.547.000
	Nilai Pagu di atas 5 milyar 10 milyar	1.764.000
	Nilai Pagu di atas 10 milyar 50 milyar	2.044.000
	Nilai Pagu di atas 50 milyar	2.324.000
6.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	
	Nilai Pagu Dana s/ d 100 jt	535,135
	Nilai Pagu di atas 100 jt - 250 jt	632,432
	Nilai Pagu di atas 250 jt - 500 jt	729,733
	Nilai Pagu di atas 500 jt	827,027

III. PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN

1. BIDANG PENDIDIKAN

Jabatan	Besaran TPP
a. Pengawas Sekolah	4.459.459
b. Kepala Sekolah	4.013.514
c. Guru	837.371

2. BIDANG PENGAWASAN (Auditor, Auditor Kepegawaian, P2UPD)

Jabatan	Kelas	Besaran TPP
Jenjang JF Terampil		
JF Pelaksana	6	1.684.988
JF Pelaksana Lanjutan	7	2.281.235
JF Penyelia	8	2.662.866
Jenjang JF Ahli	9	2.716.123
JF Pertama	10	2.770.445
JF Muda	11	2.797.607
JF Madya	12	2.881.535

IV. PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA JABATAN TERTENTU

Jabatan	Besaran TPP
Inspektur Pembantu	5.000.000
Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	5.000.000
Sekretaris Pimpinan (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah)	4.221.145
Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	3.668.126
Jabatan Pelaksana yang ditempatkan pada Kelompok Pembantu Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah)	1.222.709
Pengelola Kinerja	1.621.622
Admin SIAP/SIMPEG/SITIMBEL	810.811
Pengolah Daftar Gaji dan Tunjangan	810.811
Operator SIAP/SIMPEG/Mang Bagja/SITIMBEL/SIMDA/SIK	608.108
Admin Lapor	608.108
Pembantu Teknis pada Alat Kelengkapan Dewan	608.108
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1.824.324

Plt. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NP. 19760604 200602 1 002